



Empowering the family welfare movement for domestic violence prevention in Campaka Village Purwakarta

Diah Zaleha Wyandini¹, Gemala Nurendah², Sri Maslihah³, Muhammad Ariez Musthofa⁴, Ita Juwitaningrum⁵,
Engkos Kosasih⁶

¹Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Indonesia

diah.wyandini_psi@upi.edu¹, gemalanurendah@upi.edu², maslihah_psi@upi.edu³, ariezpsi@upi.edu⁴,
juwitaningrum_psi@upi.edu⁵, eksankosasihi@upi.edu⁶

ABSTRACT

Community service in Campaka Village, Purwakarta Regency, focused on empowering cadres of the Family Empowerment and Welfare Movement Team (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/TP PKK) to prevent domestic violence, strengthen family resilience, and protect children. Domestic violence remains a social issue that can be influenced by a lack of knowledge, fear, economic dependence, power relations, a culture of silence, and limited access to perceived safe support. The method used was a quasi-experimental one-group pretest-posttest design through a community-based psychoeducational intervention. The activity involved 40 TP PKK cadres, with 33 participants completing the pre-test and post-test questionnaires. The activity covered an introduction to domestic violence, family resilience, and child-friendly villages. The results showed an increase in cadre knowledge, as indicated by a higher percentage of cadres in the high category. This activity also included counseling for children and families who are victims of sexual abuse. For future village programs and community service teams, it is recommended to continue implementing ongoing education, mentoring cadres, and strengthening community-based referral networks.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 20 Jan 2026

Revised: 14 May 2026

Accepted: 26 May 2026

Publish online: 25 Jun 2026

Keywords:

domestic violence; family welfare movement; PKK; psychoeducation.

Open access

Dedicated: Journal of Community Services (Pengabdian kepada Masyarakat) is a peer-reviewed open-access journal

ABSTRAK

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Campaka, Kabupaten Purwakarta berfokus pada pemberdayaan kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penguatan ketahanan keluarga, dan perlindungan anak. Permasalahan KDRT masih menjadi persoalan sosial yang dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, rasa takut, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, budaya diam, serta akses yang terbatas untuk mendapatkan dukungan yang dirasa aman. Metode yang digunakan adalah kuasi-eksperimental dengan desain one-group pretest-posttest melalui intervensi psikoedukasi berbasis komunitas. Peserta kegiatan berjumlah 40 kader TP PKK, dengan 33 peserta yang mengisi kuesioner pre-test dan post-test secara lengkap. Materi kegiatan meliputi pengenalan KDRT, ketahanan keluarga, dan desa ramah anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kader, ditandai dengan meningkatnya persentase kader dengan pengetahuan dalam kategori tinggi. Kegiatan ini juga mencakup konseling bagi anak dan keluarga korban pelecehan seksual. Untuk program desa dan tim PkM di masa yang akan datang, disarankan untuk tetap melaksanakan edukasi berkelanjutan, pendampingan kader, serta penguatan jejaring rujukan berbasis komunitas.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga; pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; PKK; psikoedukasi.

How to cite (APA 7)

Wyandini, D. Z., Nurendah, G., Maslihah, S., Musthofa, M. A., Juwitaningrum, I., & Kosasih, E. (2026). Empowering the family welfare movement for domestic violence prevention in Campaka Village Purwakarta. *Dedicated: Journal of Community Services (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 4(1), 323-334.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright



2026, Diah Zaleha Wyandini, Gemala Nurendah, Sri Maslihah, Muhammad Ariez Musthofa, Ita Juwitaningrum, Engkos Kosasih. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: diah.wyandini_psi@upi.edu

INTRODUCTION

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tetap mendapat perhatian dalam wacana pembangunan nasional, khususnya yang terjadi dalam ranah relasi domestik. Kekerasan berbasis gender tidak lagi diposisikan sebagai persoalan individual semata, melainkan telah bertransformasi menjadi isu sistemik yang terbentuk melalui dinamika interaksi antara faktor struktural, kultural, dan relasional. Perspektif ini sejalan dengan kerangka ekologi sosial yang memandang kekerasan sebagai hasil interaksi antara faktor individu, relasi, komunitas, dan struktur sosial yang lebih luas (Heise, 1998). Secara empiris, tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin menegaskan urgensi penanganan yang komprehensif. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual (dapat diakses pada: <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024>).

Data tersebut diperkuat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang mencatat bahwa hingga 3 Juli 2025 terdapat 14.039 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil di lapangan karena fenomena *underreporting* masih tinggi. Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang relatif tinggi. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2024 terdapat ratusan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ditangani melalui layanan UPTD PPA. Ini mencerminkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di tingkat daerah (dapat diakses pada: <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>).

Secara lebih spesifik, Kabupaten Purwakarta dipilih sebagai lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) karena menunjukkan tingkat kerentanan keluarga yang cukup tinggi. Data Pengadilan Agama Purwakarta mencatat sekitar 950 perkara perceraian pada Januari-Juli 2024, dengan lebih dari 70% gugatan diajukan oleh pihak istri dan mayoritas dipicu oleh faktor ekonomi (dapat diakses pada: <https://www.papurwakarta.go.id/informasi/layanan-informasi-perkara/statistik-perkara/statistik-perceraian-tahun-2024>). Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika relasi domestik yang berpotensi meningkatkan risiko kekerasan serta menunjukkan bahwa upaya pencegahan berbasis komunitas belum optimal. Lebih lanjut, sejumlah studi terdahulu menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas melalui pendekatan psikoedukasi berpotensi meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mencegah kekerasan (Agde *et al.*, 2026; Basel *et al.*, 2025; Reyal *et al.*, 2024; Suhadianto & Ananta, 2023; Sumaryanti *et al.*, 2022).

Peningkatan pengetahuan keluarga melalui edukasi partisipatif tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga mendorong munculnya kesiapan, kesadaran, dan perubahan perilaku dalam menjalankan peran pengasuhan serta memberikan dukungan kepada keluarga. Dalam pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan pembelajaran partisipatif dapat menjadi strategi preventif yang efektif karena melibatkan anggota keluarga secara aktif dalam proses pembelajaran, refleksi, dan pemecahan masalah bersama (Hamzah *et al.*, 2024). Melalui peningkatan literasi keluarga, penguatan komunikasi interpersonal, serta pengembangan kesadaran akan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, potensi terjadinya konflik yang berujung pada perilaku kekerasan dapat diminimalkan sehingga tercipta relasi keluarga yang lebih sehat, suportif, dan harmonis.

Meskipun demikian, sebagian besar intervensi yang ada masih cenderung berfokus pada peningkatan pengetahuan individu dan belum secara optimal mengintegrasikan penguatan kapasitas sosial serta

pemberdayaan komunitas secara berkelanjutan. Berdasarkan kondisi di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan pendekatan intervensi pada tingkat komunitas. Oleh karena itu, PkM ini berfokus pada pemberdayaan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berbasis *community-based intervention* yang mengintegrasikan psikoedukasi dan penguatan kapasitas sosial secara partisipatif. Model ini tidak menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, melainkan pada memperkuat peran kader sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong pencegahan kekerasan. Kader PKK dipilih karena kedekatannya dengan keluarga dan komunitas, sehingga tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas kader serta mengevaluasi efektivitas program dalam memperkuat peran mereka di masyarakat.

Literature Review

Social Ecological Model (SEM)

Pendekatan *Social Ecological Model (SEM)* digunakan sebagai model analitik untuk memahami perilaku dan perubahan sosial sebagai hasil interaksi dalam suatu sistem. Menurut Bronfenbrenner dalam “*The Ecology of Human Development Experiments by Nature and Design*” model ini berakar pada teori ekologi perkembangan yang menekankan bahwa individu berada dalam lingkungan sosial yang saling berinteraksi, sehingga proses perkembangan tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial yang membentuknya. Dalam lingkup kerja PKM, *SEM* menjadi relevan karena menjelaskan bahwa optimalisasi peran kader PKK dalam pencegahan KDRT tidak cukup dilakukan pada level individu, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika pada level interpersonal, komunitas, dan struktural. Kajian kekerasan berbasis gender dikembangkan lebih lanjut melalui *ecological framework of violence*, yang mengintegrasikan faktor individu, relasional, komunitas, dan struktural dalam menjelaskan kompleksitas terjadinya kekerasan (Heise, 1998).

Sejalan dengan itu, pendekatan sosial-ekologis menegaskan bahwa perilaku tidak hanya ditentukan oleh faktor kognitif seperti pengetahuan dan sikap, tetapi juga merupakan hasil interaksi dinamis antara individu dan lingkungannya (McLeroy et al., 1988; Stokols, 1996). Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan cenderung lebih optimal ketika dirancang berbasis komunitas, terutama jika perubahan norma sosial dilakukan secara beriringan dengan penguatan kapasitas individu (Ullman et al., 2025). Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunitas yang mengintegrasikan perspektif sosial-ekologis lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran sekaligus mencegah kekerasan dibandingkan dengan intervensi yang hanya berpusat pada individu (Leight et al., 2023). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa intervensi berbasis pengetahuan saja belum cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, sehingga perlu dilengkapi dengan penguatan aspek psikososial (Eriksson et al., 2025; Sheppard et al., 2024).

Program pemberdayaan kader PKK berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencegah KDRT (Agustin & Suratmi, 2026; Suharnanik & Sholahudin, 2025). Penguatan peran kader tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga mendorong partisipasi aktif komunitas dalam penanganan kasus (Separen et al., 2025). Selain itu, pendekatan partisipatif dalam penguatan ketahanan keluarga memperkuat kemampuan kader dalam edukasi dan advokasi (Elanda & Putri, 2024). Sebagai langkah preventif, penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran terhadap bentuk dan dampak KDRT, sementara pelatihan kader memperkuat pengetahuan, keterampilan, serta peran mereka sebagai agen perubahan sosial (Adenisatrawan & Lilianti, 2025; Asih & Arsil, 2022; Yulianto & Asmawati, 2024).

Social Cognitive Theory

Pelaksanaan program PkM yang berfokus pada pemberdayaan kader PKK dalam pencegahan KDRT memerlukan landasan teoretis yang mampu menjelaskan mekanisme perubahan perilaku. Menurut Bandura dalam “*Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*”, *Social Cognitive Theory* (SCT) dinilai relevan karena dapat menjelaskan bahwa perilaku terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*). Kader PKK tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai agen aktif yang mampu mengolah, menginternalisasi, dan menerapkan pengetahuan melalui pengalaman langsung serta proses pembelajaran observasional di lingkungan sosialnya. Proses pembelajaran tidak hanya bersumber dari materi pelatihan, tetapi juga berkembang melalui pengamatan terhadap fasilitator, interaksi dengan sesama kader, serta praktik nyata di lapangan.

Menurut Bandura dalam “*Social Learning Theory*”, posisi kader sebagai *role model* di komunitas ikut berkontribusi dalam membuka peluang terjadinya *vicarious learning*, yaitu proses belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain beserta konsekuensinya, sehingga perilaku preventif terhadap kekerasan dapat direplikasi oleh anggota masyarakat lain. Relevansi SCT dalam intervensi berbasis komunitas dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa program partisipatif yang mengintegrasikan pembelajaran sosial, refleksi kelompok, dan perubahan norma gender mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, serta praktik pencegahan kekerasan secara signifikan (Reyal *et al.*, 2024). Selain itu, intervensi yang melibatkan pemimpin komunitas, fasilitator sebaya, dan proses pembelajaran kelompok terbukti efektif dalam mendorong perubahan norma sosial serta mengurangi kekerasan berbasis gender melalui mekanisme observasi, peniruan perilaku, dan penguatan sosial (Leight *et al.*, 2023).

Empowerment Theory

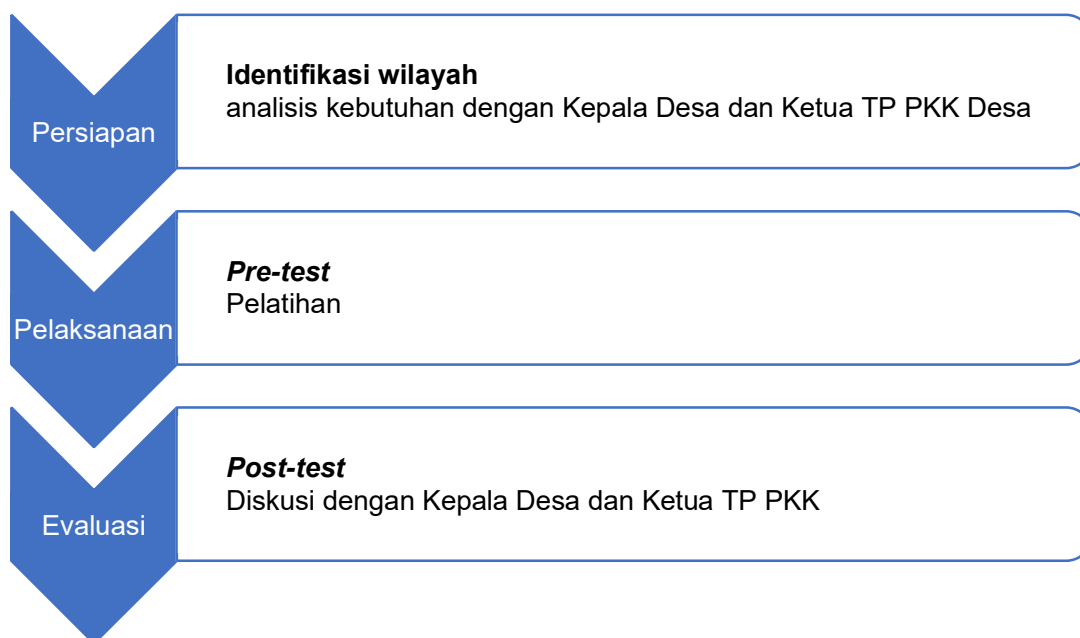
Merujuk pada perspektif *empowerment theory*, pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga sebagai proses penguatan kontrol, partisipasi aktif, serta akses terhadap sumber daya sosial dan struktural. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu mengendalikan keputusan serta kondisi yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan mencakup tiga komponen utama, yaitu intrapersonal (keyakinan akan kemampuan diri), interaksional (pemahaman terhadap lingkungan sosial dan sumber daya), serta perilaku (tindakan nyata untuk memengaruhi perubahan), sejalan dengan pernyataan Zimmerman dalam “*Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis*.” Perkembangan penelitian terbaru memperkuat relevansi teori *empowerment* dalam intervensi berbasis komunitas.

Studi empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis berkontribusi signifikan terhadap peningkatan perilaku prososial, sehingga memperkuat peran pemberdayaan sebagai mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan (Messman *et al.*, 2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pemberdayaan memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, dengan identitas komunitas dan kepercayaan sosial berperan sebagai mediator penting dalam proses tersebut (Noordink *et al.*, 2024; Sun *et al.*, 2024). Pendekatan pemberdayaan juga terbukti efektif dalam membangun relasi kolaboratif, meningkatkan keterlibatan partisipan, serta mengatasi ketimpangan kekuasaan melalui proses partisipatif yang lebih inklusif (Jurkowski *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya merupakan konsep teoritis, tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat dalam meningkatkan efektivitas intervensi sosial, khususnya melalui penguatan kapasitas individu dan kolektif serta keterlibatan aktif dalam proses perubahan sosial.

METHODS

Kegiatan PKM ini menerapkan pendekatan kuasi-eksperimental dengan desain *one-group pretest-posttest* yang dipadukan dengan intervensi berbasis pelatihan. Desain ini memungkinkan pengukuran perubahan pada subjek sebelum dan sesudah perlakuan dalam satu kelompok tanpa kelompok kontrol. Oleh karena itu, efektivitas intervensi dapat dievaluasi secara langsung, sejalan dengan pernyataan Campbell dalam "*Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research.*" Intervensi pelatihan dirancang berdasarkan prinsip *capacity building* yang menekankan penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai dasar perubahan perilaku. Proses pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai pembelajaran sosial melalui observasi, diskusi, dan refleksi atas pengalaman.

Pendekatan ini diperkuat dengan strategi psikoedukasi Caplan dalam "*Principles of Preventive Psychiatry*" yang berorientasi promotif-preventif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu maupun kelompok dalam menghadapi isu sosial, termasuk KDRT. Peserta kegiatan ini adalah 40 orang kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di Desa Campaka, Kabupaten Purwakarta yang dipilih oleh Ketua TP PKK Desa Campaka berdasarkan peran strategisnya dalam komunitas. Intervensi berupa psikoedukasi berbasis komunitas difokuskan pada peningkatan literasi KDRT, penguatan ketahanan keluarga, serta pemahaman tentang desa ramah anak. Berikut kegiatan PKM secara keseluruhan.



Gambar 1. Alur kegiatan
Sumber: PKM Desa Campaka, 2024

Dari **Gambar 1** dijelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan PKM meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim PKM mengidentifikasi wilayah Desa Campaka dan melakukan analisis kebutuhan dengan berdiskusi bersama Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa Campaka. Pada tahap pelaksanaan, terdapat *pre-test*, dilanjutkan dengan pemberian materi dan diskusi interaktif berbasis studi kasus. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan *posttest*. Tahap evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan langsung dan jeda 1 bulan setelah kegiatan.

Evaluasi setelah kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil sebelum dan sesudah intervensi. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur yang mengukur aspek pengetahuan tentang KDRT, kemudian dianalisis secara deskriptif komparatif untuk menilai peningkatan kapasitas peserta. Pendekatan ini memberikan landasan berpikir yang sistematis untuk mengevaluasi efektivitas program sekaligus memperkuat peran kader PKK sebagai agen perubahan dalam pencegahan KDRT di tingkat komunitas. Evaluasi setelah satu bulan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui diskusi bersama Kepala Desa dan Ketua TP PKK.

RESULTS AND DISCUSSION

Kegiatan PKM Desa Binaan dengan tema "Pemberdayaan Kader PKK Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Bebas dari Kekerasan Domestik" di Desa Campaka, Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan kunjungan ke Desa Campaka pada tanggal 5 Juni 2024, yakni diskusi dengan Kepala Desa Campaka terkait analisis kebutuhan di lapangan (lihat **Gambar 2**) serta hal-hal yang menjadi latar belakang kegiatan PKM Desa Binaan.



Gambar 2. Tahap Analisis Kebutuhan Desa Campaka Terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Sumber: Dokumentasi PkM Desa Campaka, 2024

Kegiatan dilanjutkan pada tanggal 27 Juni 2024. Tim PKM berdiskusi dengan Kepala Desa Campaka, Ibu Ketua PKK Desa Campaka, serta perangkat desa yang terkait dengan kegiatan ini.



Gambar 3. FGD bersama dengan Kepala Desa, Ketua PKK dan perangkat Desa Campaka
Sumber: Dokumentasi PkM Desa Campaka, 2024

Pada kegiatan ini tim PkM dan Tim Desa Campaka melakukan analisis kebutuhan di lapangan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang sesuai dengan tema pematerian pelatihan serta adanya informasi mengenai adanya kasus yang mengindikasikan pelecehan seksual yang baru terjadi di desa tersebut (lihat: **Gambar 3**).

Tahap Pelaksanaan

Kegiatan utama dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024, mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00. Kegiatan dimulai dengan mengarahkan para peserta untuk mengisi kuesioner *pre-test* terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh tiga narasumber dan satu moderator (lihat **Gambar 4**).



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan ketika Peserta Menyimak Penyampaian Materi
Sumber: Dokumentasi PkM Desa Campaka, 2024

Pemaparan materi yang disampaikan dalam kegiatan PkM Desa Binaan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengenali Kekerasan dalam Rumah Tangga: Secara keseluruhan, mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah awal yang penting untuk melindungi individu dari berbagai bentuk kekerasan tersebut.
2. Ketahanan Keluarga: Berfungsi sebagai pilar utama dalam pembentukan individu dan komunitas yang sehat serta produktif. Ketahanan keluarga adalah kunci untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera serta mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Ketahanan keluarga juga menjadi dasar utama dalam pembentukan masyarakat yang lebih baik.
3. Desa Ramah Anak: Pentingnya mewujudkan desa yang ramah anak, yaitu desa yang menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Desa memiliki kebijakan dan program yang melindungi hak-hak anak dan menjaga kesejahteraan mereka

Lebih lanjut, dari 40 peserta pelatihan, hanya 33 orang yang mengisi kuesioner secara lengkap pada *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut.

Tabel 1. Pre-Test dan Post-Test Pengetahuan KDRT Kader TP PKK Desa Campaka

Kategori	Rumus	Pre-test		Post-test	
		Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Tinggi	$50 \geq X$	11	33%	12	36%
Rendah	$X < 50$	22	67%	21	64%

Sumber: PKM Desa Campaka, 2024

Berdasarkan **Tabel 1**, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan persentase jumlah kader PKK yang mempunyai pengetahuan tentang KDRT dengan kategori tinggi. Selain kegiatan pelatihan, tim PKM melakukan sesi konseling dan pendampingan bagi anak dan keluarga korban pelecehan seksual yang baru terjadi di wilayah Desa Campaka. Sesi konseling dan pendampingan dilakukan oleh psikolog anggota tim PKM. Konseling dan pendampingan dilaksanakan selama 2 jam. Psikolog dan asisten psikolog mendengarkan hal-hal yang dirasakan oleh korban dan keluarga, kemudian mengarahkan langkah lebih lanjut yang dapat diambil agar dapat lepas dari pengalaman buruk yang mereka alami atau *trauma healing* (berkaitan dengan etika dan privasi, dokumentasi sesi konseling tidak dipublikasikan).

Tahap Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan berupa *post-test* yang dilakukan segera setelah pelatihan. Hasil *post-test* terlihat pada **Tabel 1**. Selain itu, evaluasi dengan tim desa, yaitu kepala desa dan ketua TP PKK, dilakukan sebulan setelah pelaksanaan pelatihan secara daring.

Discussion

PkM Desa Binaan di Desa Campaka dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini bukan hanya tempat untuk berbagi informasi; itu juga tempat untuk bertemu, berdiskusi, dan memahami masalah masyarakat yang sesungguhnya. Berdasarkan pandangan *Social Ecological Model* Bronfenbrenner dalam "*The Ecology of Human Development Experiments by Nature and Design*", pencegahan KDRT dipahami sebagai interaksi antara individu, keluarga, komunitas, dan struktur sosial yang lebih luas.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terdapat peningkatan tingkat pengetahuan kader TP PKK Desa Campaka terkait KDRT. Dari 33 peserta yang mengisi kuesioner secara lengkap, jumlah peserta dengan pengetahuan kategori tinggi mengalami kenaikan dari 11 orang (33%) pada *pre-test* menjadi 12 orang (36%) pada *post-test*. Sebaliknya, peserta dengan pengetahuan kategori rendah mengalami penurunan dari 22 orang (67%) menjadi 21 orang (64%). Walaupun peningkatannya hanya sedikit, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi awal dalam meningkatkan pemahaman kader tentang pentingnya mengenali KDRT serta dampaknya terhadap kehidupan keluarga.

Peningkatan pengetahuan yang terbatas mengindikasikan bahwa KDRT tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kognitif individu (Putri, 2025; Saputro, 2025). Perilaku kekerasan terbentuk melalui interaksi kompleks antara faktor individu, relasi, komunitas, dan struktur sosial, sehingga pencegahannya memerlukan pendekatan berjenjang yang mencakup perubahan pada semua level secara bersamaan (Alsina et al., 2024). Intervensi berbasis pengetahuan saja belum memadai untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan; perlu didukung oleh penguatan psikososial dan dukungan sosial yang memadai (Sheppard et al., 2024). Temuan dari sesi tanya jawab peserta pelatihan mengungkapkan

bahwa korban sering kali tidak segera melapor bukan karena tidak merasakan penderitaan, melainkan karena merasa tidak aman, khawatir disalahkan, atau takut masalah keluarga dianggap sebagai aib.

Salah seorang peserta mengungkapkan kasus tetangganya yang menjadi korban kekerasan suami, namun enggan melapor karena khawatir situasinya justru memburuk dan tidak memiliki kemandirian finansial untuk meninggalkan suaminya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban sering menghadapi hambatan berupa rasa takut terhadap konsekuensi pelaporan, rasa malu, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa yang tidak setara dalam keluarga, serta norma sosial dan budaya yang mendorong korban untuk tetap diam. Faktor-faktor tersebut dapat membatasi kemampuan korban dalam mencari bantuan dan memperkuat siklus kontrol yang dilakukan pelaku (Bauer *et al.*, 2026).

WHO menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan oleh pasangan intim, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak serius pada kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi korban (dapat diakses pada: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>). Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, kader PKK memiliki posisi strategis sebagai agen edukasi KDRT di tingkat komunitas. Kedekatan kader dengan warga dan pemahaman mereka terhadap kondisi sosial setempat menjadikan kader sebagai pintu masuk untuk membangun sistem dukungan berbasis komunitas. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan terstruktur mampu meningkatkan pengetahuan, kesiapan, kepercayaan diri, dan keterampilan kader dalam mengidentifikasi serta melakukan skrining awal terhadap korban kekerasan (Hanjani *et al.*, 2023).

Melalui pendampingan yang intensif, kader menjadi lebih kompeten dalam mengenali tanda-tanda KDRT, memberikan respons awal yang tepat, serta menghubungkan korban dengan layanan rujukan yang diperlukan (Khonitatillah, 2024). Program pemberdayaan kader PKK berbasis komunitas terbukti meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan KDRT, tidak hanya melalui pemahaman hukum, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam penanganan kasus (Separen *et al.*, 2025). Pendekatan partisipatif juga memperkuat kemampuan kader dalam memberikan edukasi dan advokasi kepada keluarga. Peran kader PKK dapat dipahami melalui SCT, yang menekankan bahwa perilaku terbentuk melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan (*reciprocal determinism*), sejalan dengan pernyataan Bandura dalam "*Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*".

Sesi konseling dan pendampingan kepada anak dan keluarga korban pelecehan seksual menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Bagi korban dan keluarga, pengalaman kekerasan atau pelecehan seksual dapat menimbulkan rasa takut, bingung, marah, sedih, malu, bahkan trauma. Dalam situasi seperti ini, kehadiran psikolog yang mendengarkan dengan empati dapat menjadi langkah awal untuk membantu korban dan keluarga merasa tidak sendirian. Dukungan psikologis awal setelah peristiwa traumatis penting untuk diberikan karena dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan menghubungkan korban dengan dukungan lanjutan (Hermosilla *et al.*, 2023).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi satu kali belum cukup untuk membentuk perubahan pengetahuan dan keterampilan kader secara signifikan. Isu KDRT, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak membutuhkan proses belajar yang berulang serta pelatihan lanjutan yang lebih praktis, seperti studi kasus, simulasi cara merespons korban, latihan komunikasi empatik, pengenalan alur rujukan, serta pendampingan berkala. Hal ini penting karena orang-orang terdekat korban, termasuk keluarga, teman, dan anggota komunitas, sering berperan dalam membantu korban kekerasan domestik, tetapi mereka juga memerlukan pelatihan agar mampu memberikan respons yang aman dan tepat (Bird *et al.*, 2024). Berdasarkan *empowerment theory*, pemberdayaan kader bukan hanya sekadar peningkatan pengetahuan atau keterampilan, tetapi juga merupakan proses penguatan kontrol, partisipasi aktif, dan akses terhadap sumber daya sosial maupun struktural.

Zimmerman dalam “*Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis*” menyebutkan bahwa pemberdayaan mencakup komponen interpersonal, interaksional, dan perilaku. Kegiatan PkM ini dapat menjadi fondasi awal untuk membangun Desa Campaka yang lebih peduli terhadap pencegahan KDRT dan perlindungan anak. Meskipun peningkatan pengetahuan masih terbatas, kegiatan ini berkontribusi dalam membuka ruang belajar, berdiskusi, dan memahami bahwa KDRT bukan sekadar masalah pribadi, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Kolaborasi antara pemerintah desa, TP PKK, puskesmas, psikolog, sekolah, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak dapat melanjutkan program ini sehingga korban dapat memperoleh dukungan yang aman, etis, dan berfokus pada pemulihan.

CONCLUSION

Kegiatan PkM ini menjadi langkah awal dalam membangun kepedulian masyarakat. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kader TP PKK mengenai KDRT, meskipun peningkatannya masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi telah memberikan kontribusi awal dalam membuka pemahaman kader, namun isu KDRT membutuhkan proses pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Melalui PkM ini, dapat dilihat bahwa KDRT bukan hanya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa takut, rasa malu, ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan budaya diam yang membuat korban sulit mencari pertolongan. Oleh karena itu, kader PKK memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem dukungan berbasis komunitas karena mereka dekat dengan kehidupan keluarga di desa dan dapat membantu mengenali tanda-tanda awal KDRT, memberikan edukasi, serta mengarahkan korban ke layanan yang tepat. Selain itu, sesi konseling dan pendampingan bagi anak dan keluarga korban pelecehan seksual menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga dukungan emosional dan psikologis. Secara keseluruhan, kegiatan PkM ini menjadi langkah awal yang bermakna dalam upaya pencegahan KDRT dan perlindungan anak di Desa Campaka. Program serupa perlu dilanjutkan melalui pelatihan berkala, pendampingan kader, penguatan jejaring rujukan, serta kolaborasi antara pemerintah desa, TP PKK, tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Terima kasih kepada Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Direktorat PPM Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Desa Binaan di Desa Campaka dengan tema “*Pemberdayaan Kader PKK Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Bebas dari Kekerasan Domestik*”

REFERENCES

- Adenisatrawan, A., & Lilianti, L. (2025). Penyuluhan hukum tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya perlindungannya. *Lentera Pengabdian*, 3(3), 343-348.
- Agde, Z. D., Tiore, L. L., Abdissa, H. G., Abageda, M., Agafari, G. B., Magnus, J. H., Assefa, N., & Wordofa, M. A. (2026). Effectiveness of community-based health education intervention on knowledge, attitudes, and controlling behaviors related to intimate partner violence in Hadiya Zone, Central Ethiopia: a cluster randomized controlled trial. *BMC Women's Health*, 1(1), 1-10.
- Agustin, D., & Suratmi, T. (2026). A pemberdayaan kader PKK melalui edukasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak: Edukasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak. *Jurnal Pengabdian Harapan Ibu (JPHI)*, 8(1), 87-92.

- Alsina, E, Browne, J L, Gielkens, D, Noorman, M A J & de Wit, J B F. (2024). Interventions to prevent intimate partner violence: a systematic review and meta-analysis. *Violence Against Women*, 30(3-4), 953-980.
- Asih, E. R., & Arsil, Y. (2022). Pemberdayaan kader PKK untuk pencapaian gizi seimbang. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 214-221.
- Basel, W. C. P., Dewi, F. I. R., & Sahrani, R. (2025). Psiko-edukasi pencegahan kekerasan siber remaja perempuan dalam bermedia sosial. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(1), 21-27.
- Bauer, F., Dlamini, N., & Coutinho, M. (2026). Prioritizing barriers to help-seeking for intimate partner violence. *Psychology of Woman Journal*, 7(1), 1-11.
- Bird, K. S., Stokes, N., Rivas, C., Tomlinson, M., Delve, M., Gordon, L., Gregory, A., Lawrence, K., & O'Reilly, N. (2024). Training informal supporters to improve responses to victim-survivors of domestic violence and abuse: A systematic review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(2), 1568-1584.
- Elanda, Y., & Putri, R. Y. (2024). Optimalisasi peran Kader PKK dalam penguatan ketahanan keluarga dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Kabupaten Gresik. *Berdaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 21-29.
- Eriksson, M., Sundberg, L. R., Santosa, A., Lindgren, H., Ng, N., & Lindvall, K. (2025). Health behavioural change - the influence of social-ecological factors and health identity. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 20(1), 1-16.
- Hamzah, A., Hatimah, I., Saepudin, A., Pramudia, J. R., & Masingboon, K. (2024). Eksplorasi pengetahuan keluarga sebagai dasar melakukan pembelajaran partisipatif dalam pelayanan homecare kepada pasien paska stroke. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 16(1), 186-196.
- Hanjani, V. P., Suyanto, S., & Purwanti, T. (2023). Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang dalam rangka mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 5 tentang Kesetaraan Gender. *Harmoni: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 77-81.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: an integrated, ecological framework. *Violence against Women*, 4(3), 262-290.
- Hermosilla, S., Forthal, S., Sadowska, K., Magill, E. B., Watson, P., & Pike, K. M. (2023). We need to build the evidence: a systematic review of psychological first aid on mental health and well-being. *Journal of Traumatic Stress*, 36(1), 5-16.
- Jurkowski, J. M., Perry, J. M., Anselma, M., Beckerman-Hsu, J., Aftosmes-Tobio, A., & Davison, K. K. (2025). Leveraging Psychological empowerment in community-based participatory research: A case study. *Journal of Participatory Research Methods*, 6(3), 1-19.
- Khonitallah, N. A. (2024). Peningkatan kapasitas kader PKK melalui program pelatihan: Menuju organisasi yang lebih efektif. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 38-40.
- Leight, J., Cullen, C., Ranganathan, M., & Yakubovich, A. (2023). Effectiveness of community mobilisation and group-based interventions for preventing intimate partner violence against women in low-and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 13(1), 1-15.
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An ecological perspective on health promotion programs. *Health Education Quarterly*, 15(4), 351-377.

- Messman, E., Scott, B., Smith-Darden, J., Cortina, K., Thulin, E., Zimmerman, M., & Kernsmith, P. (2022). Psychological empowerment as a route for positive adjustment during adolescence. *Journal of Applied Developmental Psychology, 83*(1), 1-22.
- Noordink, T., Verharen, L., Schalk, R., & Van Regenmortel, T. (2024). A conceptual exploration of psychological empowerment with older people. A tailored concept mapping approach. *Journal of Gerontological Social Work, 67*(8), 1153-1173.
- Putri, F. (2025). Persepsi wanita tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Women's perceptions about Domestic Violence (KDRT). *Jurnal Ilmiah Pamenang, 7*(1), 90-95.
- Reyal, H. P., Perera, M. N., & Guruge, G. N. D. (2024). Effectiveness of a community-based participatory health promotion intervention to address knowledge, attitudes and practices related to intimate partner violence: A quasi-experimental study. *BMC Public Health, 24*(1), 1-12.
- Saputro, E. (2025). Efektivitas strategi pendampingan pekerja sosial dalam menghadapi krisis keluarga. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 6*(2), 145-168.
- Separan, S., HZ, E. D., Rasudin, N., Erdiansyah, E., Artina, D., & Haryono, D. (2025). Penguatan peran kader PKK dalam pencegahan kekerasan rumah tangga. *Smart Humanity: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(1), 23-33.
- Sheppard, L., Alsubhi, M., Brown, V., Le, H., Robinson, K., & Moodie, M. (2024). What interventions are cost effective in reducing violence against women? A scoping review. *Applied Health Economics and Health Policy, 22*(3), 283-296.
- Stokols, D. (1996). Translating social ecological theory into guidelines for community health promotion. *American Journal of Health Promotion, 10*(4), 282-298.
- Suhadianto, S., & Ananta, A. (2023). Pencegahan kekerasan seksual pada remaja di sekolah menengah pertama melalui pemberian psikoedukasi. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 4*(1), 177-186.
- Suharnanik, S., & Sholahudin, U. (2025). Membangun kesadaran dan peran kader pendamping keluarga dalam pencegahan kekerasan rumah tangga di Desa Tejoasri, Lamongan. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7*(3), 365-376.
- Sumaryanti, I. U., Putera, V. S., Permana, R. H., & Suhana, S. (2022). Community based intervention to promote prevention towards children sexual abuse. *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium Atlantic Press, 658*(1), 1-3.
- Sun, C., Liu, J., & Chen, Y. (2024). Impact of empowerment on public participation awareness in community renewal projects: mediating role of trust and community identity. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 24*(3), 1-14.
- Ullman, C., Amin, A., Bourassa, A., Chandarana, S., Dutra, F., & Ellsberg, M. (2025). Interventions to prevent violence against women and girls globally: A global systematic review of reviews to update the RESPECT women framework. *BMJ Public Health, 3*(1), 1-12.
- Yulianto, M. A., & Asmawati, W. O. (2024). Peran pendamping kasus perempuan korban kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1*(4), 206-228.